

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa masyarakat Indonesia bisa dikatakan sebagai masyarakat heterogen yang tidak mudah dalam menciptakan kondisi yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Hal itu, karena mereka dapat menerima pembaharuan yang didasarkan dari proses-proses pembangunan politik serta dorongan arus globalisasi. Selain itu, tidak disangka masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak memberikan kepeduliannya terhadap arus globalisasi sekarang ini. Salah satu, komunitas yang digambarkan dalam situasi tersebut yakni Masyarakat Adat Samin, tentu terdapat alasan mengapa masyarakat samin menolak pada arus globalisasi. Sedangkan menurut Almod dan Verb mengatakan bahwa orientasi politik diciptakan dalam membentuk suatu sikap dan nilai politik untuk menggambarkan bentuk dari perilaku politiknya<sup>1</sup>. Dikarenakan, sikap dan perilaku hidup masih berpandangan dengan akultur budaya mereka, sehingga dalam lingkungan yang kehidupan masyarakat samin masih mempertahankan kultur budaya aslinya dan masyarakat adat samin yang sangat meminggirkan kehidupan modern, dan lebih mengutamakan kehidupan tradisional.

Menurut pendapat Albert Widjaja budaya politik merupakan aspek politik yang terdiri dari sistem nilai, pengetahuan, adat istiadat, dan mitos<sup>2</sup>. Sedangkan menurut

---

<sup>1</sup> M. Nur Alamsyah, "Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia". Jurnal Academia Fisip Untad VOL. 2 No. 02 Oktober 2010

<sup>2</sup> Akhmad Satori, Wiwi Widiastuti, Hendra Gunawan. Budaya Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Vol. 2 Nomor I. Januari 2013, hlm. 185-208

Nazarudin dalam suryani mengemukakan dua faktor dalam sub-budaya politik adalah proses dari adanya adat istiadat dan sistem kepercayaan. Tentunya, adat maupun agama memiliki keterkaitan dalam membangun sebuah sistem penyerapan dan sistem pembentukan pada masyarakat mengenai kekauasan atau membentuk pandangan individual masyarakat mengenai peran yang mungkin dimainkan dalam sistem politik<sup>3</sup>.

Selain itu, pada tingkatan perilaku politik masyarakat Indonesia mengalami perkembangan secara signifikan dalam proses sejarah panjang bangsa ini. Pada masa pemerintahan kolonial, bentuk perilaku politik dapat dikatakan sangat terbatas, aktivitas pemerintah kolonial dalam membatasi ruang gerak politik dilakukan melalui kekarasan, kondisi seperti ini dikatakan pemerintahan atau negara menjadi kuat (*strong state*). Pada situasi inilah politik etnis dalam tingkatan partisipasi politik mulai menunjukkan eksistensinya, meski dalam prosesnya mengalami batasan pada kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Berbeda dengan masyarakat tradisional yang secara bertahap dalam meningkatkan partisipasi politik. Kemudian perilaku politik masyarakat Indonesia mulai menemukan titik kebangkitan dengan dilakukannya pemilihan umum menggunakan sistem multi-partai pada tahun 1955.

Sejarah kata Samin berarti *sami-sami*, saminisme merupakan sebuah ajaran yang bermula pada kegelisahan Surowijoyo terhadap tingkah laku pemerintahan Belanda. Kemudian, Surowijoyo melakukan tindakan gerakan moral yang merubah

---

<sup>3</sup> Munadi, Budaya Politik Masyarakat Samin (Sedulur Sikep). E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No 1. Hal 2

namanya menjadi samin. Samin memiliki arti sebagai *sama rata, sama sejahtera dan sama mufakat*. Samin dapat dikatakan dengan sebutan *wong cilik*, orang-orang memandang dan menilai masyarakat samin berbeda-beda. Memang sebagian orang memandang masyarakat samin secara negatif. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat samin memiliki keidentikan dengan tidak mau membayar pajak dan suka “membangkang”.

Dalam kebudayaan Samin, terdapat sebuah ajaran yang dinamai sebagai ajaran Saminisme, ajaran ini berbentuk pemahaman dalam menumbuhkan semangat perlawanan pada kekuasaan kolonial. Masyarakat samin dibalik bentuk perilaku yang negatif terdapat bentuk positif, antara lain masyarakat samin dinilai sebagai masyarakat yang religi tentu ini sangat menarik, jika kita kaitkan dengan proses kehidupan sosial dan politik saat ini. Hal ini, merupakan bagian dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negara ini yang dalam sejarah panjang sejak reformasi tahun 1998. Kemudian, perjalanan setelah reformasi mengakibatkan perubahan elemen-elemen perubahan salah satunya terdapat pada perundang-undang bangsa Indonesia.

Pada suatu negara yang memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki suku sebanyak 1.340 bukan hal mudah dalam menggabungkan itu semua. Tentu semua itu harus dilandaskan dengan sebuah ideologi bangsa, dengan ideologi yang kuatlah akan menciptakan keharmonisan antar suku yang berbeda. Selain itu, terdapat proses marginalisasi masyarakat tradisional, tentu proses ini sudah berlangsung sejak era kolonial belanda sampai era orde baru.

Masyarakat marjinal secara tidak langsung mendapatkan label negatif, karena timbulnya perbedaan yang terjadi pada mereka. Menurut Anna Van Lowenhaupt, mengatakan bahwa negara dalam arti kebudayaan memiliki kecenderungan yang negatif, tindakan negatif ini diartikan sebagai intervensi pemerintah terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan Satroatmodjo berpendapat bahwa proses marjinalisasi yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Didasarkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perlawanan politik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut. Tentu hal ini yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sedulur sikep yang berada pada Kabupaten Pati, Grobogan, Blora, Rembang, dan Bojonegoro.

Terdapat tokoh yang berpengaruh pada perkembangan masyarakat samin hingga saat ini, tokoh tersebut adalah Samin Surosentiko, beliau merupakan sesepuh dari masyarakat sedulur sikep. Perlawanan yang diusung oleh Samin Surosentiko adalah perlawanan tanpa kekerasan, artinya masyarakat samin diajarkan untuk bersifat *ngeyel* atau *ngegendeng*,<sup>5</sup> apabila berintraksi dengan bangsa penjajah kala itu. Peperangan tanpa kekerasan merupakan salah satu gerakan yang diusung oleh sesepuh samin dalam melakukan perlawanan pada pihak-pihak belanda. Dengan mengandalkan *ngegendengnya* masyarakat samin berhasil dalam melakukan manipulasi informasi terhadap pihak belanda, perlawanan tanpa kekerasan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai samin, masyarakat samin menilai dengan ke *ngegendengnya* setidaknya dalam melakukan perlawanan tidak mengkotorkan tangan dari masyarakat samin tersebut.

---

<sup>4</sup> Huzer Apriansyah, 2005, Budaya dan Perilaku Politik Masyarakat Pengikut Saminisme. Purwokerto: UNSOED, 2005, Hlm 23

<sup>5</sup> Syahrul Kirom, “ Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan di Indonesia”. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 9 Issue 1, July 2021. Hal. 151.

Realitas dari proses gerakan perlawanan ini, maka stigma negatif bermunculan dari sebagian masyarakat. Selain itu pemerintahan orde baru, melakukan pembatasan dan pemindahan masyarakat samin yang masih tersisa saat itu. Dengan bantuan Pemerintah Blora tahun 1991 secara resmi menyatakan bahwa masyarakat samin sudah tidak ada lagi.

Berbagai langkah dan upaya pemeritahan orde baru dalam melakukan marjinalisasi (*suatu proses dalam peminggiran etnis yang menyebabkan kemiskinan*) masyarakat adat, namun dengan semangat dan adanya nilai leluhur eksistensi masyarakat samin muncul kembali pada bentuk politik, sosial, ekonomi, maupun seni-seni lokal.

Dari pembahasan diatas mengenai budaya poltik dalam Pilkada, peneliti akan mengkaji pola perilaku masyarakat samin pada budaya politik dalam meningkatkan partsipasi politik pada pemilukada. Pada pemilukada tahun 2020, mbah Lasiyo sebagai tokoh adat samin, mengatakan bahwa beliau tidak ikut berpartisipasi pada pemilukada yang akan berlangsung. Pilkada Kabupaten Blora memiliki tiga kandidat calon bupati dan wakil bupati. Mbah Lasiyo tidak ikut memilih, bukan berarti mengajak masyarakat samin-nya untuk melakukan tindakan golput (golongan putih).

Namun sebaliknya beliau memandang pada nilai-nilai saminisme diutarakan tidak ingin menyakiti perasaan salah satu paslon yang kalah dalam pemilu. Sehingga dengan perkembangan zaman pun, mbah Lasiyo memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya (JawaPos. 2022)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Mahfudz Muntaha, 2020. Pesan Mbah Lasiyo, Sesepeuh Samin Blora tentang Pilkada.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan 17 April 2019, masyarakat samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, mamastikan untuk netral dalam pemilihan capres dan cawapres. Mbah Lasiyo selaku sesepuh adat samin tidak berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Beliau mengatakan bahwa lebih memilih netral dalam pemilihan capres dan cawapres, “*entah besok siapa yang unggul dalam masalah pemilihan presiden ini, dialah bapak saya yang sejati*”.<sup>7</sup> (detiknews. 2019)

Masyarakat samin sangat antusias dalam mengikuti proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Blora, dilihat dari semangat masyarakat secara aktif datang ke Tempat Pengumutan Suara (TPS) untuk menunaikan hak pilih (politiknya) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora Jawa Tengah 2020. Hal lain, masyarakat samin dalam menjalankan proses politik mereka memberikan sebuah batasan. Seperti masyarakat atau tim sukses kandidat peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye di lingkungan masyarakat samin, akan tetapi masyarakat samin pun menolak untuk ikut berpartisipasi pada salah satu kandidat pemilu.<sup>8</sup>

Selain itu, dalam menjalankan proses politik masyarakat selalu mengimbanginya dengan nilai-nilai kebudayaan *saminisme*, yakni dilihat dengan masyarakat samin menolak adanya praktik-praktik politik uang (*money politic*) yang bertabrakan dengan nilai kejujuran yang selama ini dipegang teguh

---

<sup>7</sup> Arif Syaefudin, 2019. Soal Pilihan Capres, Ini Jawaban Tokoh Samin di Blora. (News Detik.com)

<sup>8</sup> Muh Fathoni Hasyim, Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu Perspektif Figh Siyazah. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14 No. 2, Desember 2020

oleh masyarakat samin dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Sejatinya, pilkada serentak merupakan pemilihan gubernur, walikota dan bupati yang dilaksanakan pada lima tahun sekali yang dilakukan secara bersamaan (serentak) secara nasional. Bahwa pilkada serentak dilaksanakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan mengenai beban anggaran dalam penyelenggaraan. Dalam pelaksanaan pilkada, per-pemilihan walikota atau bupati biaya yang harus dikeluarkan sekitar 25 miliar, sedangkan untuk pelaksanaan pilkada tingkat gubernur biaya yang harus dikeluarkan sekitar 500 miliar.

Tentu itu bukan angka yang kecil, maka dalam lima tahun sekali uang negara yang keluar dari anggaran sebesar 30 triliun untuk pelaksanaan pilkada, pilkada serentak merupakan jawaban dari permasalahan yang selama ini terjadi pada sistem pemilihan bangsa ini, sehingga dapat diperkirakan dengan dilaksanakannya pilkada serentak dapat memangkas setengah biaya yang sudah dianggarkan.<sup>9</sup> Melihat geografis bangsa Indonesia yang memiliki jumlah 38 provinsi dan memiliki demografis yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Oleh karena itu, pilkada serentak merupakan sistem baru pada pemilihan bangsa ini yang sekaligus untuk mengatasi berbagai permasalahan atas pilkada yang diselenggarakan selama ini.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020, dengan dihadiri tiga pasangan calon yakni calon nomor satu Dwi Asruringsih-Riza Yudha, nomor dua Arief Rohman - Try Yuli Setyowati

---

<sup>9</sup> Heri Budiman, *Pilkada tidak langsung&Demokrasi palus*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015 hal. 13

dan nomor dua nomor tiga Umi Kulsum - Agus Sugiyanto. Dari ketiga kontestan tersebut, pasangan Arief Rohman - Tri Yuli Setyowati mendapatkan 318.380 suara atau 59,71%, sedangkan pasangan Umi Kulsum-Agus Sugiyanto mendapatkan 199.646 suara. Sementara pasangan calon Dwi Asruriningsih - Riza Yudha memperoleh 15.181 suara. Total suara sah berdasarkan perhitungan resmi KPU Kabupaten Blora sebanyak 533.213 suara. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 10.970 suara atau total 544.183 suara pemilih.

**Table 1.1 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	JATI	12	122	19.796	19.926	39.722	
2	RANDEBLATUNG	18	135	30.386	31.269	61.655	
3	KRADENAN	10	101	16.231	16.485	32.716	
4	KEDUNGTUBAN	17	144	23.097	23.017	46.114	
5	CEPU	17	180	28.235	29.266	57.501	
6	SAMBONG	10	64	11.107	11.356	22.463	
7	JIKEN	11	96	15.601	15.833	31.434	
8	JEPON	25	154	24.592	24.920	49.512	
9	BLORA	26	242	35.012	36.949	71.961	
10	TUNJUNGAN	15	121	18.593	19.250	37.843	
11	BANJAREJO	20	154	24.316	24.569	48.885	
12	NGAWEN	29	149	23.948	23.996	47.944	
13	KUNDURAN	26	166	26.265	26.675	52.940	
14	TODANAN	25	154	25.401	25.788	51.189	
15	BOGOREJO	14	65	10.172	10.391	20.563	
16	JAPAH	18	91	14.049	14.504	28.553	
Total		295	2.198	346.801	354.194	700.995	

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora*

Sementara berdasarkan keputusan KPU Blora, daftar pemilih tetap sebanyak 700.995 pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri dari 346.801 laki-laki dan 354.194 perempuan. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020. Dengan demikian, jumlah pemilih pada saat pemungutan suara sebanyak 2.198 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang



tersebar di 295 desa di 16 wilayah kamatan se-Kabupaten Blora. Hasil rekapitulasi data secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora meningkat secara signifikan sebesar 77,63% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 700.995 pemilih.<sup>10</sup>

Seiring perjalanan panjang bangsa Indonesia ke arah modernisasi politik muncul berbagai macam pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat samin dalam mempertahankan budaya mereka. Terutama yang berhubungan dengan budaya politik, kemudian bagaimana mereka menyikapi dinamika perpolitikan negara yang selalu pasang surut terutama dalam pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pilpres. Gambaran diatas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang telah menarik perhatian khusus penulis untuk mencoba melakukan kajian secara mendalam mengenai budaya, perilaku politik dan partisipasi politik masyarakat samin terhadap kontestasi Pemilukada serentak tahun 2020 di Kabupaten Blora.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang telah di uraikan pada bagian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul yakni, **“Budaya Politik Masyarakat Samin Sedulur Sikep Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2020 Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.”**

---

<sup>10</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, 2020. DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Budaya politik dan Pemilu merupakan serangkaian proses dari sistem demokrasi bangsa Indonesia, kedua memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dalam proses perpolitikan. Terkait dengan hal tersebut penting untuk mendapatkan deskripsi empiris mengenai budaya politik masyarakat yang ada di Indonesia. Sesungguhnya, Indonesia adalah negara berkembang yang tengah melakukan penguatan dalam berbagai sektor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan dan sistem demokrasi.

Budaya politik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat samin sangat erat hubungannya dengan suatu nilai yang dipelajari oleh masyarakat samin yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya, seringkali ajaran saminitime ini menimbulkan sebuah perspektif negatif pada masyarakat umumnya. Tentunya hal ini berkaitan dengan perilaku politik atau sikap politik yang dipengaruhi oleh berbagai proses peristiwa masa lalu yang memiliki kesinambungan secara dinamis.

Pilkada serentak 2020 sejatinya dalam proses pelaksanaannya mengalami tantangan yang begitu rumit, dimana dalam pelaksanaannya mengalami pro - kontra di masyarakat yang menilai bahwa Pilkada tersebut akan menghasilkan jumlah angka golongan putih (golput) meningkat. Hal ini, diperlukan kerja keras kepada semua lini sektor untuk meningkatkan rasa aman dalam melaksanakan Pilkada tersebut. Begitu pula, pada lingkup masyarakat samin bahwa masyarakat samin tidak menutup diri untuk tidak berpartisipasi dalam proses pemilihan, akan tetapi harus dilihat salah satu faktor yang mempengaruhi

masyarakat samin dalam proses pemilihan maupun berpartisipasi dalam politik yang belum memberikan gambaran yang konkrit pada pemerintah dan masyarakat.

Dari penjelasan latarbelakang dan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis, yakni :

1. Bagaimana Pola Budaya Politik Dalam Mempengaruhi Perilaku Politik Masyarakat Samin ?
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Dalam Kontestasi Pilkada Tahun 2020 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah;

- a. Mengidentifikasi pola budaya politik dalam perilaku politik masyarakat samin.
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat Samin dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Blora.
- c. Memperoleh gelar S.Sos pada Program Studi Ilmu Politik di Universitas Nasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

- a. Manfaat Akademis

Untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Blora menjadikan referensi dimasa yang

akan datang dan mengetahui budaya politik masyarakat samin dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 di Kabupaten Blora.

b. Manfaat Praktis

Untuk memperluas dalam keilmuan dan untuk menjadi bahan referensi penulis dalam perkembangan perpolitik pada Kabupaten Blora, khususnya Desa Klopoduwur dalam masyarakat adat samin sedulur sikep.

c. Manfaat Sosial

Untuk dijadikan sebagai manfaat kepada masyarakat agar dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai langkah untuk mendeskripsikan dan mengkaji penelitian yang berjudul **“Budaya Politik Masyarakat Samin Sedulur Sikep Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2020 Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjareho Kabupaten Blora.”**

disini penulis atau peneliti menerapkan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan sebagai bab awal yang terdiri oleh beberapa bagian, yakni Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembahasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan

kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Studi pustaka yang dibagi menjadi beberapa bagian sub mengenai teori dan konsep yang peneliti pakai, lalu kerangka pemikiran, Literature Review, teori dan konsep yang dipakai pada penelitian ini adalah teori-teori mutakhir budaya politik, perilaku politik, dan partisipasi politik.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan penelitian dan tempat penelitian, lokasi penelitian nanti yang akan memberikan gambaran bagaimana budaya politik masyarakat samin dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Kemudian dalam bab ini juga yang akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai metode penelitian yang digunakan selaras dengan bagaimana penentuan informan, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, teknis pengolahan data, analisis data, jadwal penelitian maupun lokasi penelitian.

## **BAB IV: GAMBARAN UMUM**

Bab IV ini merupakan bab yang menjelaskan atau menjabarkan gambaran umum secara keseluruhan mengenai lokasi, tempat

penelitian penulis, serta menjabarkan gambaran mengenai Kabupaten Blora dari aspek, sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

## **BAB V: Budaya Politik Masyarakat Samin Sedulur Sikep**

### **Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2020 Di Desa**

#### **Klopoduwur Kecamatan Banjareho Kabupaten**

#### **Blora.**

Bab ini menyajikan data yang telah diperoleh penulis dari hasil observasi, wawancara serta studi pustaka sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **BAB VI: KESIMPULAN**

Pada bab VI sebagai bab penutup penelitian ini adalah penutup atau akhir penjabaran yang merupakan hasil dari penelitian secara keseluruhan dan umum oleh penulis.